



PERANAN PEMERINTAH KECAMATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN FISIK DI KECAMATAN TAMIANG HULU KABUPATEN ACEH TAMIANG

¹Muhammad Afdhalu Zikri, ²Yanhar Jamaluddin

¹Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Islam Sumatera Utara

²Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Islam Sumatera Utara

Email: qonitaafifa9@gmail.com

Abstract

Developments that have been planned at the sub-district level by sub-district government officials often do not go as expected. Therefore, what is the potential of the area if the implementing apparatus does not understand the integration of development, automatically the development goals of the sub-district will not be achieved as expected. Several villages or sub-districts and headed by a Camat, have the main task of implementing regional techniques that have certain work areas and also have functions. At this writing the research was conducted in Tamiang Hulu District, Aceh Tamiang Regency, about how the role of the sub-district government in the implementation of physical development. The results of this study explain that the role of the sub-district in physical development in the Tamiang Hulu sub-district begins with the preparation of a program of development activities held at the village level, where each village carries out Musrenbang. The results of the village development plan deliberation (Musrenbangdes) are submitted to the sub-district government, thus the role of the sub-district is as a facilitator in carrying out development starting from forming meetings and inviting community leaders to participate in the planning

Keywords : *sub-district government, physical development*)

PENDAHULUAN

Setiap pembangunan fisik yang dilaksanakan harus memperhatikan hal-hal yang terdapat dalam perencanaan seperti dana, pengawasan, lokasi dan waktu pelaksanaan, keuntungan yang

diterima masyarakat, sifat dan bentuk dari proyek itu sendiri, agar dalam pelaksanaan kegiatan akan berdaya guna dan berhasil bagi masyarakat. Namun Pembangunan yang sudah direncanakan di tingkat kecamatan oleh aparat pemerintah kecamatan sering tidak berjalan



sebagaimana yang diharapkan. Hal ini terjadi karena kurangnya koordinasi seperti penyusunan rencana dan penjadwalan dari pemerintah kecamatan dalam proses pembangunan di kecamatan itu sendiri.

Seperti yang terjadi di kecamatan Tamiang Hulu yang masih kurang peran aparat untuk mewujudkan dan peran sertanya dalam proses pembangunan kecamatan, serta system koordinasi yang lemah juga merupakan salah satu kendala yang cukup serius dalam pembangunan kecamatan. Hal tersebut dapat dilihat dari observasi sementara di Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang terdapat indikasi yang mengarah pada kualitas infrastruktur yang kurang maksimal. Seperti Kualitas jalan yang kurang baik, Kualitas Infrastruktur yang kurang maksimal. Infrastruktur yang tidak sesuai dengan prediksi jangka waktu yang telah ditetapkan. Dan Adanya infrastruktur yang tidak berorientasi pada masyarakat setempat. .

Dan adanya bangunan yang tidak

beraturan dan tidak sesuai dengan perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan. Dari uraian tersebut tergambar bahwa penulis menganalisis Peranan Pemerintah Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Fisik di Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang.

KAJIAN LITERATUR DAN PEGEMBANGAN HIPOTESIS

Peranan Pemerintah Kecamatan

Peranan (Role) merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, Dia melaksanakan suatu peran. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah suatu kepentingan ilmu pengetahuan, keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Peranan meliputi tingkah laku, kewajiban dan hak-hak secara otomatis melekat pada diri (status). Levinson mengatakan bahwa peranan mencakup tiga hal,



antara lain:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan serangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi sosial masyarakat.

Hal ini juga didukung oleh Raharjo (2009) yang menyatakan peran adalah seperangkat harapan yang di dalamnya ditemui seperangkat peran (role set) yang dimiliki orang pada suatu posisi tertentu. Dapat dipahami bahwa dalam suatu status tidak hanya memiliki satu peran saja namun juga terdapat sejumlah peran lain yang saling berkaitan.

Kedudukan kecamatan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 paragraf 8 pasal 221 adalah merupakan perangkat daerah kabupaten dan daerah kota, dan kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten daerah kota dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan.

Selanjutnya dalam Pasal 48 diatur mengenai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
2. Camat dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud ayat (1) pasal ini menyelenggarakan fungsi: Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman



dan ketertiban umum,
Mengkoordinasikan penerapan
dan penegakan peraturan
perundang undangan,
Mengkoordinasikan
pemeliharaan prasarana dan
fasilitas umum,
Mengkoordinasikan
penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan di tingkat
kecamatan, Membina
penyelenggaraan pemerintahan
kelurahan, Mengkoordinasikan
kegiatan pengelolaan
kebersihan, Pelaksanaan
perencanaan dan pengendalian
teknis operasional pengelolaan
keuangan, kepegawaian dan
pengurusan barang milik daerah
berada dalam penguasaannya.

Pembangunan Fisik

Dalam hal pembangunan fisik atau infrastruktur, Effendi (dalam Rosalina, 2013:110) menyebutkan bahwa pentingnya pembangunan infrastruktur yang memadai yang berupa ketersediaan fasilitas pelayanan publik baik sarana pendidikan, sarana kesehatan, rumah

ibadah, listrik, jalan, jembatan, transportasi, air bersih, drainase, teknologi dan komunikasi. Yang bertujuan agar masyarakat dapat bergerak lebih dinamis dan mempermudah kegiatan ekonomi, serta agar para investor mau menanamkan modalnya di daerah.

Pembangunan fisik yang dimaksud adalah pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan di Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang, Setiap kegiatan atau rentetan dari usaha proses pembangunan harus dikembangkan untuk meningkatkan nilai-nilai dan objek yang dilaksanakan agar dapat berubah kearah yang lebih baik sesuai dengan tujuan yang dikehendaki.

Jadi pembangunan fisik adalah rentetan kegiatan atau proses yang bisa meningkatkan nilai - nilai suatu objek yang lebih tinggi dengan mengarah kepada hal yang lebih tinggi lagi baik itu berupa pengadaan prasarana di Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang. Untuk mencapai target dan sasaran yang telah ditentukan dalam pembagunan fisik harus



memperhatikan dan menentukan sifat dan bentuk dari objek, demikian pula dengan informasi yang jelas tentang hal-hal yang menyangkut tentang pembangunan fisik.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan dalam penelitian adalah metode Deskriptif Kualitatif, yaitu mengklasifikasikan data guna memecahkan masalah dengan mengumpulkan data, menyusun data, mengklasifikasikan serta menginterpretasikannya berdasarkan kenyataan empirik yang ada dilapangan. Dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian bersifat kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Lokasi Penelitian yang penulis teliti adalah di Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang.

Dan Informan Penelitian Subjek penelitian dipilih berdasarkan deskriptif kualitatif sehingga dalam penentuan subjek penelitian dalam bentuk informan. Peneliti menggunakan teknik purpose

sampling. Dalam menentukan informan dapat dibagi menjadi dua, yaitu informan kunci dan informan utama ialah Camat Tamiang Hulu, sekretaris Camat. Dan Informan utama ialah Kepala Bagian Perencanaan, dan Keuangan Kepala Bagian Pemerintahan. Dan Teknik Pengumpulan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Pengamatan (observasi), wawancara, dan kuesioner terbuka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk melihat bagaimana Peranan Pemerintah Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang dalam Penyelenggaraan Pembangunan Fisik dilihat dari sebagai berikut:

1. Perencanaan

Membangun kemandirian desa maupun kecamatan harus dimulai dan proses perencanaan yang baik dan diikuti dengan tata kelola program yang baik pula. Proses merencanakan kegiatan pembangunan fisik merupakan wujud nyata dari kewenangan



mengatur dan pengurus pembangunan fisik di tingkat kecamatan.

Pemerintah kecamatan tamiang hulu dalam proses perencanaan ini paling sudah melakukan rapat sebanyak lima kali dengan melibatkan semua unsur masyarakat seperti Kepala Mukim , Kepala Desa , Sekretaris Desa , Ketua BPD beserta pemerintahan kecamatan yang ada. Sedangkan kegiatan ini bersumber dari bantuan alokasi APBA.

Kemudian target yang ingin di capai adalah pembangunan jalan produksi atau jalan menuju tempat produksi masyarakat, seperti lahan perkebunan masyarakat. Adapun tanggapan dari salah satu Tokon masyarakat T. Mu'adiansyah dalam proses perencanaan pembangunan dan masalah anggaran tersebut dikatakan sebagai berikut: "Udah sangat baik dikelola masyarakat kita dan saya selaku Kepala Mukim selalu mengawasi masyarakat yang bekerja membuat pembangunan". (wawancara Oktober 2019).

Selanjutnya kepala desa

Kaloy mengemukakan berkaitan beberapa kali diadakan rapat apa saja yang dibahas rapat tersebut: "kami mengadakan rapat lima kali membahas tentang pembangunan yang akan kami bangun untuk kepentingan bersama dan yang di antara yang dilibatkan untuk kegiatan tersebut semuanya dilibatkan termasuk masyarakat seperti Kepala Mukim, Tokoh Adat, pemerintah desa dan jajarannya". (wawancara Oktober 2019).

2. Pengawasan

Dalam upaya melakukan pengawasan pembangunan fisik di tingkat kecamatan maupun di tingkat desa Pemerintah Kecamatan memiliki peranan yang sangat penting, sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad Nur selaku Camat Tamiang Hulu, mengatakan: "Dalam pelaksanaan pembangunan saya selaku Camat datang langsung melihat dan mengawasi setiap pekerjaan pembangunan yang ada. Jadi, dengan adanya pengawasan dari saya maka pembangunan desa bisa



selesai tepat waktu sesuai dengan rencana”. (wawancara Oktober 2019)

Pembangunan desa merupakan bagian dari pembangunan nasional, sehingga dalam pelaksanaannya, pembangunan desa dapat memberikan pengaruh yang kuat terhadap pembangunan nasional. Dalam hal ini pemerintah kecamatan diharapkan dapat mendorong kepala desa dan aparatur desa untuk menjalankan pembangunan desa. Meskipun kepala desa bukan bawahan langsung dari Camat, namun dalam hal pengawasan pembangunan desa yang dilakukan oleh Camat Agar pembangunan dapat terlaksana dengan efektif, komitmen Camat Tamiang Hulu dalam pengawasan pembangunan lebih mengedepankan pengawasan yang terpusat.

Dimana aparatur pemerintahan desa sebagai pelopor pembangunan disertai dengan keterlibatan masyarakat yang langsung dapat berperan sebagai pengawas pembangunan desa.

Pembangunan-pembangunan yang terdapat di desa-desa pada hakekatnya adalah kehendak masyarakat desa untuk memajukan desa dengan berbagai sumber daya yang dimilikinya.

Pemerintah Kecamatan adalah aktor utama pelaksanaan pembangunan desa yang diberikan tanggung jawab dalam memelopori pelaksanaan pembangunan. Sewaktu-waktu Camat dan jajarannya tidak datang ke lokasi pembangunan maka Camat akan berkoordinasi dengan kepala desa. Karna kepala desa adalah orang nomor dua setelah Camat untuk mengawasi pembangunan desa. Atau camat menunjuk pejabat pemerintah kecamatan untuk datang ke lokasi pembangunan untuk berkoordinasi dengan kepala desa dan kepala pembangunan. Adanya pengawasan yang dilakukan oleh Camat terhadap pembangunan desa telah membawa dampak positif kepada masyarakat terhadap pembangunan desa.

Hal tersebut karena setiap adanya pembangunan di desa,



Camat setiap saat selalu melibatkan masyarakat dengan menanyakan langsung kepada masyarakat desa setempat. Dari berbagai penyampaian pendapat yang telah dikemukakan dalam penelitian ini diketahui bahwa dalam pembangunan di kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang Pengawasan merupakan bagian penting untuk mencapai target dan sasaran pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh penduduk desa setempat.

3. Analisis dan Peran Kecamatan dalam Musrenbang

Dalam proses pembangunan, lebih khususnya pada pembangunan fisik memiliki proses atau tahapan-tahapan dalam perencanaan kegiatan tersebut. Dalam proses atau tahapan perencanaan tersebut, kecamatan memiliki peran dalam hal ini kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang.

Peran kecamatan dalam pembangunan fisik adalah sebagai

berikut: Penyusunan program adalah suatu rangkaian kegiatan-kegiatan atau seperangkat tindakan untuk mencapai suatu tujuan. Penyusunan program kegiatan di kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang terlebih dahulu diadakan Musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa). Hal itu dilakukan oleh desa untuk kegiatan rencana pembangunan desa. Sesuai dengan yang di ungkapkan oleh Camat Tamiang Hulu pada saat diwawancarai.

Penyusunan Rencana Kegiatan pembangunan bersumber dari informasi berupa data dari desa-desa yang ada di Kecamatan Tamiang Hulu, data tersebut merupakan hasil dari Musrenbangdes yang biasanya dihadiri oleh para pemerintah desa, serta masyarakat setempat, yang kemudian hasil dari musrenbang diajukan ke kecamatan sebagai acuan penyusunan rencana pembangunan di tingkat kecamatan. Dalam tahapan pelaksanaan musrenbang desa terdiri dari:



1. Tahapan persiapan

Kepala desa menetapkan tim fasilitator musrenbang desa yang terdiri dari BPD dan aparat pemerintah lainnya, tugas memfasilitasi pelaksanaan musyawarah ditingkat dusun serta memfasilitasi pelaksanaan musrenbang desa, Masyarakat ditingkat dusun dan kelompok masyarakat melakukan musyawarah, Kepala desa menetapkan tim penyeenggara musrenbang desa.

2. Tahapan pelaksanaan

Penyusunan program kegiatan pembangunan fisik di kecamatan Tamiang Hulu di mulai dari tingkat desa. Dalam hal ini setiap desa mengadakan musrenbangdes atau perencanaan program pembangunan prioritas yang diadakan di desa sebelum di adakan musrenbang di tingkat kecamatan. Setelah data yang di dapat oleh pihak kecamatan dari desa melalui musrenbangdes, kemudian hasilnya diteruskan ke kecamatan untuk di

musyawarahkan kembali pada Musrenbang tingkat kecamatan bersama SKPD terkait. Setelah itu hasil dari Musrenbang tingkat kecamatan yang telah di putuskan oleh camat selaku pengambilan keputusan, kemudian diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.

Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam upaya melancarkan kegiatan pemerintahan di kecamatannya khususnya dalam pembangunan fisik di Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang, Camat dapat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan 60 berbagai pihak terkait, Koordinasi dan kerjasama tersebut sangat penting karena segala hambatan atau kendala dapat dengan mudah diatasi melalui keterlibatan pihak lain untuk memberikan bantuan dan kerjasamanya terutama dalam memenuhi kebutuhan fasilitas.

Camat dituntut memiliki kemampuan berkoordinasi dan bekerjasama dengan berbagai



pihak, seperti pemerintah Kabupaten pejabat, dari instansi terkait, tokoh masyarakat, dari masyarakat atau stakeholder lainnya.

4. Analisis Kendala dan Hambatan Pemerintah Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Fisik

Dalam proses kegiatan pembangunan khususnya dalam pembangunan Fisik, sudah pasti memiliki berbagai kendala atau hambatan yang dihadapi oleh pihak kecamatan baik dalam perencanaan, pengambilan keputusan, maupun dalam penyelenggaraan kegiatan yang akan dilaksanakan. Pada kecamatan tamiang hulu mengalami kendala atau hambatan yaitu dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan sangat sulit untuk dilakukan. Dalam perencanaan serta dalam pengambilan keputusan musrenbang dikecamatan sangat sulit dalam hal memutuskan program desa yang lebih diprioritaskan untuk direncanakan

atau yang akan segera direalisasikan pelaksanaannya karena semua program. Merupakan rencana pembangunan prioritas utama tiap desa, sehingga tiap desa memiliki kemauan untuk segera rencana programnya direalisasikan. .

Dalam hal kendala atau hambatan yang dihadapi kecamatan Tamiang Hulu di kabupaten ini, dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi ada dua jenis yaitu kendala internal dan kendala eksternal.

Kendala internal yaitu: kesulitan dalam hal perencanaan dan pengambilan keputusan program yang paling diprioritaskan oleh pihak kecamatan dari tiap-tiap program yang diajukan desa atau dengan kata lain seleksi prioritas utama dari tiap-tiap hasil musrenbangdes.

Kendala eksternal : Yaitu tidak semua data yang diajukan / diprogramkan di musrenbang direalisasikan oleh pemerintah daerah, dan juga masih kurangnya partisipasi masyarakat untuk mendukung program kecamatan



dalam pembangunan fisik.

KESIMPULAN

Kesimpulan Dari hasil penelitian yang peneliti peroleh dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perencanaan

Dalam hal perencanaan pemerintah kecamatan tamiang hulu sangat intensif dalam membangun komunikasi ke berbagai pihak seperti jajaran Kepolisian (Kapolsek), Koramil (Danramil), Kepala Mukim , Kepala Desa, Tokoh Adat, serta berbagai Tokoh Masyarakat Lainnya . Hal tersebut dibuktikan dengan diadakannya rapat rutin yang di adakan dalam merencanakan suatu prioritas pembangunan khususnya di tingkat Kecamatan.

Dari kesimpulan beberapa informan, perencanaan pembangunan ini terdapatnya suatu pengarahan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan, adanya pedoman bagi perencanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian

tujuan pembangunan, dalam proses pentingnya perencanaan sebelum melakukan tindakan ekonomi untuk menanggulangi kegagalan-kegagalan yang terjadi dalam proses kegiatan pembangunan fisik maupun ekonomi.

2. Pengawasan

Pengawasan yang dilakukan pemerintah kecamatan tamiang hulu dalam hal pembangunan fisik telah terlihat dari kunjungan langsung ke lokasi berbagai pembangunan khususnya di tingkat kecamatan maupun desa, Camat dan jajarannya berinteraksi langsung dengan lingkungan setempat, hal semacam ini adalah suatu strategi pengawawasan yang dilakukan pemerintah kecamatan untuk mendorong keterlibatan penuh tokoh masyarakat demi terwujudnya efektivitas pembangunan fisik yang dilakukan. dengan demikian pemerintah kecamatan juga bisa mendeteksi kendala dan hambatan yang terjadi .

REFERENSI

Abu Ahmadi. 1982. *Psikologi*



- Sosial*. Surabaya : PT Bina Ilmu
- Agung. S.S. Raharjo. 2009. *Buku Kuntong Sosiolog*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama
- Ali, Muhammad. 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Modern*. Jakarta : Pustaka
- Amani Budiman, Arief. 2016. *"Teori Pembangunan"*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Lemhannas. 2015, *Pembangunan Nasional*. Jakarta: Balai Pustaka
- Muljana , 2001. *Perencanaan Pembangunan Nasional, Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional Dengan Fokus Repalita*. Jakarta: UI PRESS
- Nurman, 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Ofriani,
- jufri sumampoe dan Jack Roedijiso. 2017. *Pembangunan Wilayah Berwawasan Kesehatan*. Jogjakarta: Deepublish City Budi Utama
- Rosidin, Utang , 2015. *"Otonomi Daerah Dan Desentralisasi"*. Bandung : Pustaka Setia
- Siswanto dan Miftah Toha. 2012. *Pengantar Manajemen Dan Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta : Rajawali Pers
- Sugiono. 2011. *"Memahami Penelitian Administrasi"*. Bandung: Alfabeta .
- Soekanto, Socrjono dan Budi Sulistywati. 2006. *"Sosiologi suatu pengarang"* Jakarta: Rajawali Pers.
- Syahrur dan Salim. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Citapustaka Media
- Tinbergen.Jan. 1987. *"Rencana Pembangunan"*. Jakarta : Universitas Indonesia .

